

DAFTAR BACAAN

BUKU

Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H. Akademisi, Praktisi, dan Politisi*, Prenada Media, Jakarta, 2012.

Glen S. Krutz, *'Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress,'*, Ohio State University Press, Ohio, 2001.

Indrati, Maria Faida, *Ilmu Perundang – Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, Edisi Revisi I, 2007.

Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.

Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang – Undangan*, Perpustakaan Nasional RI, Makassar, 2017.

P.W. Brouwer *et.al.*, *Recht, een introductie*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2004.

Peter Mahmud Marzuki., *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.

Tamanaha, Brian Z, *Law As a Means to an End, Threat to the Rule of Law*, Cambridge University Press, New York, 2006.

Watson, Alan, *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*, University of Georgia Press, Athens, 1974.

JURNAL

Anggono, Bayu Dwi, *'Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang – Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang – Undangan Indonesia'*, Jurnal *Rechtsvinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9, No 1, 2020.

- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', Jurnal KERTHA WICAKSANA, Vol 12, No 2, 2018.
- Busroh, Firman Freaddy, 'Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan', Jurnal Arena Hukum, Vol 10, No 2, 2017.
- Cakra, Putu Eka dan Sulistyawan, Aditya Yuli, 'Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia', Jurnal Crepido, Vol 2, No 2, 2020.
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang - Undang', Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 27, No 2, 2020.
- Dodek, Adam M., 'Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations', *Ottawa Law Review*, Vol 48, No 1, 2017.
- Dua, Mikhael, 'Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arendt', *Respons: Jurnal Etika Sosial*, Vol 14, No 1, 2009.
- Febriananingsih, Nunuk, 'Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik', Jurnal *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No 1, 2012.
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*', Jurnal Gema Keadilan, Vol 6, No III, 2019.
- Irfani, Nurfaqih, 'Asas *Lex Superior, Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 6, No III, 2019.
- Jati, Rahendro, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang – Undang Yang Responsif', Jurnal *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No 3, 2012.
- Muhshi, Adam, 'Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan *Good Governance*', Jurnal Lentera Hukum Universitas Jember, Vol 5, No 1, 2018.
- Nugraha, Muhyar, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah', Jurnal YUSTISI, Vol 3, No 1, 2016.

Nurdiansyah, Edwin, ‘Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat’, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 3, No 2, 2016.

Siallagan, Haposan, ‘Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia’, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol 18, No. 2, 2016.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

SITUS

Hasanah, Sovia, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, *www.hukumonline.com*, 9 Mei 2018, h. 1, dikunjungi pada tanggal 22 November 2020.

Mahendra, A.A. Oka, “Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan”, *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, 29 Maret 2010, h. 1, dikunjungi pada tanggal 21 November 2020.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020”, <https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/12/Prolegnas-Prioritas-Tahun->

2020_16Jan2020_Pemantauan-PSHK.pdf, 18 Desember 2019, h. 1, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2021.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, “Permasalahan Proses Legislasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, <https://pshk.go.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>, 11 November 2020, h. 1, dikunjungi pada tanggal 22 November 2020.

Renaldo, Hendi, “Omnibus Law dalam Teori dan Melompati Praktik”, www.ombudsman.go.id, 28 Februari 2020, h. 1, dikunjungi pada tanggal 21 November 2020.

Yasin, Muhammad, “Plus Minus Metode Omnibus Law”, www.hukumonline.com, 19 Oktober 2020, h. 3, dikunjungi pada tanggal 24 November 2020.

BERITA

Adiyudha, Rizkyan, “Pakar Nilai RUU Ciptaker Dibutuhkan untuk Kepastian Hukum”, *Republika.id* (online), 18 Mei 2020, h 1 <https://republika.co.id/berita/qahtqr354/pakar-nilai-ruu-ciptaker-dibutuhkan-untuk-kepastian-hukum>.

Anjany, Rany dan Mulyani, Yuyu, “President Jokowi Instructs Coordinating Minister to Draft Omnibus Law”, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 24 Oktober 2019, h 1 <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-instructs-coordinating-minister-to-draft-omnibus-law/>.

Astutik, Yuni, “Ketua DPR Imbau Masyarakat Cegah COVID-19 Secara Mandiri”, *CNNIndonesia* (online), 18 Maret 2020, h 1 <https://www.cnnindonesia.com/news/20200318222805-4-145969/ketua-dpr-imbau-masyarakat-cegah-covid-19-secara-mandiri>.

Aziz, Abdul, “Daftar Anggota Satgas Omnibus Law: James Riady hingga Erwin Aksa”, *tirto.id* (online), 16 Desember 2019, h 1 <https://tirto.id/daftar-anggota-satgas-omnibus-law-james-riady-hingga-erwin-aksa-enxx>.

CNN Indonesia, “Jokowi Sebut Omnibus Law Ciptaker Semangat Lompatan Kemajuan”, *CNNIndonesia* (online), 24 Oktober 2020, h 1 <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201024215737-32-562392/jokowi-sebut-omnibus-law-ciptaker-semangat-lompatan-kemajuan>.

Edon, Marsi, “Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law”, *Indonews.id* (online), 21 Oktober 2020, h 1 <https://indonews.id/artikel/313301/Hinca-Pandjaitan-UU->

Pembentukan-Peraturan-Perundang-Undangan-Tidak-Mengenal-Sistem-Omnibus-Law/.

Egeham, Lizsa, “DPR Serahkan Naskah Final UU Cipta Kerja ke Jokowi”, *liputan6* (online), 14 Oktober 2020, h 1 <https://www.liputan6.com/news/read/4382203/dpr-serahkan-naskah-final-uu-cipta-kerja-ke-jokowi>.

Farisa, Fitria Chusna, “Soal Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Dinilai Tertutup”, *Kompas.com* (online), 14 Februari 2020, h 1 <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/18062881/soal-draf-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pemerintah-dan-dpr-dinilai-tertutup?page=all>

Galih, Bayu, “BREAKING NEWS: Diteken Jokowi, Akhirnya UU Cipta Kerja Resmi Berlaku”, *Kompas News* (online), 2 November 2020, h 1 <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/02/23483311/breaking-news-diteken-jokowi-akhirnya-uu-cipta-kerja-resmi-berlaku>.

Halim, Devina, “Tanpa Partisipasi Publik, Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Cacat Moral”, *Kompas.com* (online), 3 April 2020, h 1 <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/12154791/tanpa-partisipasi-publik-omnibus-law-cipta-kerja-jadi-cacat-moral>.

Margianto, Heru, “RUU Cipta Kerja, Tragedi di Tengah Pandemi”, *Kompas* (online), 7 Oktober 2020, h 1 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/094657565/ruu-cipta-kerja-tragedi-di-tengah-pandemi?page=all>.

Marulitua, Binsar, “Ubah Himbuan, Kini Pemerintah Dorong Masyarakat Gunakan Masker Saat Keluar Rumah dan Tidak Sakit”, *TrubusNews* (online), 6 April 2020, h 1 <https://news.trubus.id/baca/36173/ubah-himbuan-kini-pemerintah-dorong-masyarakat-gunakan-masker-saat-keluar-rumah-dan-tidak-sakit>.

Mashabi, Sania, “Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur karena Tertutup dari Publik”, *Kompas.com* (online), 16 Oktober 2020, h 1 <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari>.

Nugraheny, Dian Erika, “Pembahasan Draf Omnibus Law Tertutup, Komnas HAM: Pelanggaran Serius Konstitusi”, *Kompas.com* (online), 30 Januari 2020, h 1 <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/19160111/pembahasan-draf-omnibus-law-tertutup-komnas-ham-pelanggaran-serius?page=all>.

- Oktaryal, Agil, “Bahaya Omnibus Law terhadap Demokrasi”, *Tempo.co* (online), 12 Desember 2019, h 1 <https://kolom.tempo.co/read/1282810/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi>.
- Prabowo, Haris, “Babak Baru Kejanggalan UU Cipta Kerja: Pesanan Revisi dari Istana”, *tirto.id* (online), 23 Oktober 2020, h 1 <https://tirto.id/babak-baru-kejanggalan-uu-cipta-kerja-pesanan-revisi-dari-istana-f6go>.
- Prastiwi, Devira, “Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing”, *Liputan6* (online), 10 Maret 2020, h 2 <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>.
- Putra, Dwi Aditya, “6 Serikat Buruh Ikut Bahas RUU Cipta Kerja, KSPI dan KSPSI Pilih Walk Out”, *Liputan6.com* (online), 8 Oktober 2020, h 1 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4377182/6-serikat-buruh-ikut-bahas-ruu-cipta-kerja-kspi-dan-kspsi-pilih-walk-out>.
- Putri, Budiarti Utami, “Dewan Pers Tidak Dilibatkan dalam Penyusunan Omnibus Law”, *Tempo.co* (online), 6 April 2020, h 1 <https://nasional.tempo.co/read/1328510/dewan-pers-tidak-dilibatkan-dalam-penyusunan-omnibus-law>.
- Putri, Budiarti Utami, “KontraS Minta Informasi Omnibus Law, Kemenkoplhukam: Rahasia”, *Tempo.co* (online), 17 Februari 2020, h 1 <https://nasional.tempo.co/read/1308455/kontras-minta-informasi-omnibus-law-kemenkoplhukan-rahasia>.
- Putri, Budiarti Utami, “Kontras Singgung Pemerintah yang Tertutup soal Omnibus Law Cilaka”, *Tempo.co* (online), 17 Februari 2020, h 1 <https://nasional.tempo.co/read/1308489/kontras-singgung-pemerintah-yang-tertutup-soal-omnibus-law-cilaka>.
- Putri, Budiarti Utami, “KPA hingga Lokataru Tolak Hadiri Undangan KSP Bahas Omnibus Law”, *Tempo.co* (online), 4 Maret 2020, h 1 <https://nasional.tempo.co/read/1315212/kpa-hingga-lokataru-tolak-hadiri-undangan-ksp-bahas-omnibus-law>.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan, “Diwarnai Banyak Penolakan, Pembahasan RUU Omnibus Law Masuk ke Bab III”, *Katadata.co.id* (online), 31 Agustus 2020, h 1 <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5f4d1f00ab7e5/diwarnai-banyak-penolakan-pembahasan-ruu-omnibus-law-masuk-ke-bab-iii>.
- Sutiawan, Iwan, “Rancangan Omnibus Law Tertutup, Berpotensi Maladministrasi”, *Gatra.com* (online), 31 Januari 2020, h 1

<https://www.gatra.com/detail/news/467463/hukum/rancangan-omnibus-law-tertutup-berpotensi-maladministrasi%2031>.

Wiratraman, Herlambang P., “Krisis Politik Legisprudensi”, *Kompas*, 14 April, 2020.

Yuanjaya, Pandhu, “UU Cipta Kerja Disahkan, Investor Segera Datang?”, *Detik News* (online), 8 Oktober 2020, h 1 <https://news.detik.com/kolom/d-5204827/uu-cipta-kerja-disahkan-investor-segera-datang>.

LAINNYA

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang – Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

Catatan Rapat Badan Legislasi dan Panja Badan Legislasi DPR.

Herlambang P. Wiratraman dalam *International Symposium on Role of Ministry of Law and Human Rights on Regulation Reformation*, “Urgensi dan Strategi Melibatkan Partisipasi Publik dalam Reformasi Regulasi”, Jember, 11 Agustus 2018.

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.